

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Sampai saat ini penelitian sejenis yang membahas tentang studi kasus mengenai evaluasi terhadap implementasi SAK ETAP masih sangat sedikit, sehingga diperlukan penelitian yang lebih banyak lagi. Hal ini dapat membantu pemahaman bagi pihak-pihak yang membutuhkan, seperti halnya UMKM dan bagi karyawan yang bekerja di bagian akuntansi atau keuangan serta bagi mahasiswa jurusan akuntansi.

Dalam artikel berjudul Standar Akuntansi Keuangan = SAK ETAP, per 1 Januari 2011 berdasarkan cuplikan dari tulisan Roy Iman Wirahardja (Anggota DSAK) dan Ersya Tri Wahyuni (Direktur Teknis IAI) (2010) mengemukakan bahwa apabila SAK-ETAP telah berlaku efektif, maka perusahaan kecil seperti UKM tidak perlu membuat laporan keuangan dengan menggunakan PSAK umum yang berlaku. Di dalam beberapa hal SAK ETAP memberikan banyak kemudahan untuk perusahaan dibandingkan dengan PSAK dengan ketentuan pelaporan yang lebih kompleks. Perbedaan secara kasat mata dapat dilihat dari ketebalan SAK-ETAP yang hanya sekitar seratus halaman dengan menyajikan 30 bab.

Penelitian yang dilakukan oleh Dayana Anggriani (2010) Mahasiswi Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta, yang menggunakan metode penelitian studi kasus dengan analisis deskriptif, membahas tentang Evaluasi Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) dalam Penyajian Laporan Keuangan pada PT. BPR Wijaya Mulya Santosa. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa PT. BPR Wijaya Mulya Santosa sudah menerapkan Standar Akuntansi Keuangan Untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP). Hal ini dibuktikan dari : (1) Dasar pengukuran dan pelaporan keuangan adalah biaya historis dan disusun dengan dasar akrual ; (2) Entitas sudah membuat laporan keuangan secara lengkap yaitu neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas serta catatan atas laporan keuangan, dan informasi yang

disajikan dalam laporan keuangan sudah sesuai dengan ketentuan SAK ETAP.

Menurut penulis kelebihan dari penelitian yang dilakukan oleh Dayana Anggriani adalah ruang lingkup penelitian yang luas yang melakukan penelitian atas seluruh laporan keuangan yang disajikan pada PT. BPR Wijaya Mulya Santosa. Sedangkan kelemahan dalam penelitian ini menurut penulis terletak pada keterbatasan penelitian terhadap laporan neraca PT. BPR Wijaya Mulya Santosa, dimana peneliti tidak menganalisis klasifikasi aset dan kewajiban berdasarkan SAK ETAP, dalam penelitian tersebut entitas tidak melakukan klasifikasi kewajiban berdasarkan fungsinya.

Dalam penelitian yang membahas tentang Pengimplementasian SAK ETAP untuk menyusun laporan keuangan dengan benar periode 2009 dan 2010 yang dilakukan oleh Monica Marcellia (2011) mahasiswi Universitas Bina Nusantara yang menggunakan metoda eksploratoria yang bersifat kualitatif, memiliki hasil penelitian antara lain (1) CV Scala Mandiri telah memiliki laporan keuangan yang terdiri dari Laporan Laba Rugi, Neraca dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Periode 2009 dan 2010 yang sesuai dengan SAK ETAP; (2) Mewajibkan pengakuan persediaan sebagai beban pada saat dijual dan menghitung penyusutan asetnya dengan menggunakan metode yang tepat agar laporan keuangan yang dihasilkan benar-benar menggambarkan kondisi perusahaan yang sesungguhnya. Perusahaan juga diwajibkan melakukan penyusunan neraca supaya pengguna laporan keuangan dapat mengetahui poisisi keuangan CV Scala Mandiri.

Menurut penulis kelebihan dari penelitian yang dilakukan oleh Monica Marcellia antara lain (1) Pembuatan Laporan Keuangan yang sesuai dengan SAK ETAP dapat membantu perusahaan untuk memenuhi salah satu syarat permohonan peminjaman dana kepada kreditur; (2) Memberikan pemahaman yang mendalam tentang SAK ETAP dan aliran siklus akuntansi dalam laporan keuangan; dan (3) Dari hasil penelitian ini diharapkan mampu menghemat biaya untuk menyewa tenaga yang ahli dibidang akuntansi. Sedangkan kelemahan dari penelitian ini, yaitu sebagai salah satu syarat untuk pengajuan kredit, dikhawatirkan pengakuan dan pengukuran yang

dilakukan dalam penelitian ini kurang objektif dan; (2) Bidang usaha yang relatif kecil sehingga tidak banyak membahas pos-pos yang ada pada SAK ETAP. Dari hasil penelitian ini penulis menemukan masalah yang belum terpecahkan atas kekurangan dari penelitian ini yaitu (1) Laporan keuangan yang menjadi objek penelitian ini sebaiknya diaudit oleh auditor independen sehingga dalam proses untuk membantu pengajuan kredit akan lebih mudah dan; (2) Banyak pos-pos tertentu yang tidak berkaitan dengan bidang usaha perusahaan yang tidak dapat dibahas dalam hasil penelitian.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Wahyu Anshari (2012) Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia yang menggunakan metode penelitian eksploratoria yang bersifat deskriptif naratif dalam penelitian yang membahas tentang (1) Pengakuan dan pengukuran aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan dan beban; dan (2) Penyajian Laporan Keuangan (*Financial Statement*). Hasil dari penelitian ini menunjukkan terdapat pengaruh dari pengimplementasian SAK ETAP pada laporan keuangan PT Daenong Global yang mengakibatkan antara lain: (1) Saldo laba perusahaan pada Neraca Awal penerapan SAK ETAP menjadi lebih tinggi dari sebelumnya yang akan memberikan keuntungan bagi para pemegang saham; (2) Pendapatan, Akibat adanya penerapan kewajiban secara akrual menyebabkan munculnya pos Pendapatan Diterima Dimuka, sehingga pendapatan usaha perusahaan menjadi lebih rendah dan; (3) Pihak-pihak istimewa, Adanya penyajian secara terpisah dari transaksi dengan pihak-pihak istimewa menimbulkan pos Piutang Hubungan Istimewa pada neraca perusahaan.

Menurut penulis kelebihan dari penelitian yang dilakukan oleh Wahyu Anshari adalah penjabaran mengenai pengakuan dan pengukuran SAK ETAP cukup lengkap yang disertai penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan sehingga memudahkan pembaca untuk memahami isinya. Sedangkan kelemahan dalam penelitian ini menurut penulis terletak pada perbandingan yang tidak setara yaitu laporan audit 2010 sedangkan pada tahun 2011 memakai laporan keuangan belum diaudit, sehingga hasilnya dinilai kurang objektif terhadap hasil akhirnya karena hanya memperlihatkan pengaruh penerapan SAK ETAP terhadap laporan keuangan internal perusahaan. Dari

hasil penelitian ini penulis menemukan masalah yang masih belum terpecahkan dari perbandingan laporan keuangan yang setara atau yang telah diaudit terhadap penerapan SAK ETAP.

There have been some studies related to the Accounting Standard without Public Accountability (SAK-ETAP) for the businesses in relation to the accounting practices on financial reports. For example, Supriyati and Putri Wulanditya (2006), STIE Perbanas Surabaya, Indonesia. The study tries to test empirically the effect of internal and external factors on the SMEs' understanding towards SAK-ETAP. This study uses primary data in which the data collection was done using questionnaires distributed to 130 respondents of SMEs in Sidoarjo and Surabaya cities. The test analysis was done by means of crosstab, independent sample test, and regression. They concluded that education improves the business practitioners' understanding of the SAK ETAP. Therefore, the higher education they have the more likely they accept and adapt to changes in the application of SAK ETAP especially since January 1, 2010 for entities without public accountability.

Yulia Rahmi (2012), Accounting Students- Faculty Of Economics Andalas University, states that Practicing UMKM accounting based on SAK ETAP give many benefits. First, UMKM can presents the financial statement itself, which it is primary requirement to propose credit loan to financial institution or banking . Second, UMKM can get information about profit, financial position, the changes of owner's equity and cash flow simply (easily). Third, UMKM can count the tax accurately based on reliable information by tax institution. Fourth, UMKM can be audited and get auditor's opinion.

2.2. Kerangka Konseptual Akuntansi

Kerangka kerja konseptual (*conceptual framework*) merupakan suatu sistem koheren yang terdiri dari tujuan dan dasar-dasar yang saling terkait yang dapat mengarah pada standar-standar konsisten dan yang menentukan sifat, fungsi dan batasan dari akuntansi keuangan dan laporan

keuangan (Kieso;2011). Berikut merupakan kerangka kerja konseptual untuk laporan keuangan:

Asumsi ;

1. Entitas Ekonomi
2. Keberlangsungan hidup
3. Satuan unit moneter
4. Periodesitas
5. Akrua

Prinsip dasar :

1. Pengukuran
2. Pengakuan pendapatan
3. Pengakuan beban
4. Pengungkapan penuh

Kendala :

1. Biaya
2. Materialitas

Karakteristik Kualitatif

1. Kualitas primer
2. Kualitas sekunder

Unsur Dasar :

1. Aset
2. Kewajiban
3. Ekuitas
4. Pendapatan
5. Beban

Tujuan :

Menyediakan informasi tentang laporan keuangan entitas yang digunakan untuk menyajikan dan melaporkan kepada investor modal yang potensial, pemberi pinjaman, kreditur lainnya dalam kapasitas sebagai penyedia modal.

Alasan dibuatnya konsep pembuatan kerangka kerja konseptual yang mendasari akuntansi ini adalah :

1. Kebutuhan akan kerangka kerja konseptual

Dengan adanya kerangka kerja ini diharapkan akan meningkatkan pemahaman dan keyakinan pemakai laporan keuangan atas pelaporan keuangan dan akan menaikkan komparabilitas antar laporan keuangan perusahaan. Oleh sebab itu, *International Accounting Standards Board* (IASB) menerbitkan standar dan aturan yang lebih berguna dan konsisten dari waktu ke waktu.

2. Perkembangan kerangka konseptual akuntansi.

Selama bertahun-tahun, berbagai organisasi telah mengembangkan serta mempublikasikan kerangka kerja konseptualnya sendiri, tetapi tidak ada kerangka kerja yang diterima secara universal dan diandalkan dalam praktik. Untuk itu, IASB dan FASB (*Financial Accounting Standards Board*) bekerja sama mengembangkan suatu kerangka kerja konseptual yang menjadi dasar bagi penetapan standar akuntansi dan pemecahan kontroversi pelaporan keuangan selama ini dan di beberapa negara. Idealnya, standar akuntansi dikembangkan sesuai dengan kerangka kerja konseptual sehingga dapat menghasilkan laporan akuntansi yang lebih bermanfaat dan hasilnya saat ini adalah IFRS (*International Financial Reporting Standards*).

2.2.1. Pengertian dan Tujuan Laporan Keuangan

Definisi laporan keuangan menurut Weygandt, Warfield, Kieso (2011) adalah sarana pengkomunikasian informasi keuangan utama kepada pihak-pihak diluar perusahaan. Dalam upaya membangun pondasi bagi akuntansi dan pelaporan keuangan, profesi akuntansi telah mengidentifikasi sekelompok tujuan pelaporan keuangan. Menurut PSAK No. 1 revisi 2009 tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Pelaporan keuangan harus

menyediakan informasi yang berguna bagi investor serta kreditur saat ini atau potensial dan para pemakai lainnya dalam menilai prospek arus kas masa depan dan tentang sumber daya ekonomi, klaim atas sumber daya tersebut dan perubahan didalamnya.

2.2.2. Karakteristik Kualitatif Dari Informasi Akuntansi

International Accounting Standards Board (IASB) mengidentifikasi karakteristik kualitatif dari informasi akuntansi yang membedakan informasi yang lebih baik (lebih berguna) dengan informasi yang rendah (kurang bermanfaat) bagi tujuan pelaporan keuangan. Karakter-karakter berikut penting digunakan untuk menilai pilihan akuntansi yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan dan dipandang sebagai hierarki kualitas akuntansi :

1. Kualitas primer, terdiri dari :

a. Relevansi (*relevance*).

Agar relevan, informasi akuntansi harus mampu membuat perbedaan dalam sebuah keputusan, jika tidak mempengaruhi keputusan, maka informasi tersebut tidak relevan. Informasi yang relevan akan membantu pemakai membuat prediksi tentang hasil akhir dari kejadian masa lalu, masa kini dan masa depan, yang disebut nilai prediktif (*predictive value*) dan juga membantu pemakai menjustifikasi atau mengoreksi ekspektasi atau harapan masa lalu, yang disebut nilai umpan balik (*confirmity value*).

b. Penyajian jujur/dapat dipercaya (*faithful representation*)

Ketepatan penyajian yang berarti bahwa angka-angka dan penjelasan dalam laporan keuangan mewakili apa yang betul-betul ada dan terjadi. Informasi yang dilaporkan harus lengkap dan mencakup semua kebutuhan yang layak dari para pemakai (*completeness*), juga disajikan harus faktual, benar tidak bias/rekayasa dan tidak dapat memilih untuk kepentingan sekelompok

kepentingan tertentu (*neutrality*), serta bebas dari kesalahan penyajian (*free from error*).

2. Kualitas Sekunder

a. Dapat dibandingkan (*comparability*)

Informasi dapat dibandingkan jika telah diukur dan dilaporkan dengan cara yang sama, sehingga pemakai dapat mengidentifikasi persamaan dan perbedaan dalam peristiwa ekonomi antar perusahaan.

b. Daya uji (*verifiability*)

Hasil akuntansi harus dapat diperiksa atau ketika pengukur-pengukur independen dengan menggunakan metode pengukuran yang sama menghasilkan pendapat yang sama.

c. Tepat waktu (*timeliness*)

Informasi harus tersedia kepada para pengambil keputusan sebelum informasi tersebut kehilangan kapasitas untuk mempengaruhi keputusan yang diambil.

d. Dapat dipahami (*understandability*)

Agar informasi dapat bermanfaat, harus ada hubungan (kaitan) antara para pemakai ini dengan keputusan yang mereka buat. Kaitan ini yaitu kemampuan memahami yang memungkinkan pemakai merasakan signifikansi dari informasi tersebut.

2.2.3. Unsur-unsur Dasar Laporan Keuangan

Unsur-unsur yang berkaitan langsung dengan pengukuran posisi keuangan adalah aset, kewajiban dan ekuitas. Ketiga unsur ini menjelaskan jumlah sumber daya dan klaim terhadap sumber daya pada suatu waktu (*moment in time*) dan didefinisikan sebagai berikut :

1. Aset

Sebuah sumber daya dalam sebuah entitas dan manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan dan dikendalikan mengalir ke entitas sebagai hasil dari transaksi atau peristiwa masa lalu.

2. Kewajiban

Sebuah kewajiban kini dalam sebuah entitas yang timbul dari peristiwa masa lalu, penyelesaian yang diharapkan dapat menghasilkan arus keluar dari entitas sumber daya yang memiliki manfaat ekonomi.

3. Ekuitas

Kepentingan residu/sisa dalam aset sebuah entitas setelah dikurangi semua kewajibannya.

Sedangkan unsur berikut menjelaskan transaksi, kejadian dan situasi yang mempengaruhi perusahaan selama periode waktu tertentu (*period in time*):

1. Pendapatan

Kenaikan manfaat ekonomi selama periode akuntansi dalam bentuk arus masuk atau penambahan lainnya atas aset atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas, selain yang berkaitan dengan kontribusi perusahaan.

2. Beban

Penurunan manfaat ekonomi selama periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau penurunan aset atau penambahan kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas, selain yang berkaitan dengan distribusi terhadap ekuitas perusahaan.

2.2.4. Konsep Pengakuan, Pengukuran dan Pengungkapan

Konsep-konsep ini menjelaskan bagaimana perusahaan harus mengakui, mengukur dan melaporkan elemen keuangan dan peristiwa.

Konsep tersebut diidentifikasi sebagai berikut :

a. Asumsi

Asumsi dasar yang mendasari struktur akuntansi keuangan adalah :

1. Entitas Ekonomi (*economic entity*)

Mengandung arti bahwa kegiatan entitas bisnis perusahaan terpisah dan dibedakan dari pemiliknya dan unit bisnis lainnya.

2. Kelangsungan hidup (*going concern*)

Mengandung arti bahwa perusahaan akan bertahan cukup lama untuk memenuhi tujuan dan komitmennya, meskipun memiliki kegagalan bisnis.

3. Satuan unit moneter (*monetary unit*)

Mengandung arti bahwa uang adalah dominator umum dari aktivitas ekonomi dan merupakan dasar yang tepat bagi pengukuran dan analisis akuntansi.

4. Periodesitas (*periodicity*)

Menyiratkan bahwa aktivitas ekonomi sebuah perusahaan dapat dipisahkan atau dibagi kedalam periode waktu yang bervariasi ada bulanan, kuartalan dan tahunan.

5. Dasar akrual akuntansi (*accrual basis of accounting*)

Mengandung arti bahwa transaksi kegiatan perusahaan dicatat dalam periode dimana peristiwa terjadi.

b. Prinsip dasar akuntansi

Prinsip dasar yang digunakan untuk mencatat transaksi adalah :

1. Pengukuran (*measurement*)

Biaya umumnya dianggap sebagai representasi setiap jumlah yang dibayar untuk item tertentu. Nilai wajar adalah jumlah dimana suatu aset yang diberikan dapat ditukarkan, kewajiban dapat diselesaikan, instrumen ekuitas yang dapat diberikan ditukarkan, antara pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar ini. IASB setelah memutuskan memberikan perusahaan pilihan untuk menggunakan nilai wajar sebagai dasar pengukuran aset keuangan dan kewajiban perusahaan.

2. Pengakuan pendapatan (*revenue recognition*)

Pendapatan harus diakui bila besar kemungkinan manfaat ekonomi masa depan akan mengalir ke perusahaan dan pengukuran yang dapat diandalkan dari jumlah pendapatan yang dihasilkan.

3. Pengakuan beban (*expenses recognition*)

Arus keluar dari aset atau kewajiban (kombinasi keduanya) selama periode berjalan sebagai akibat dari pengiriman atau produksi barang atau jasa yang diterima.

4. Pengungkapan penuh (*full disclosure*)

Prinsip ini mengakui bahwa sifat dan jumlah informasi yang disajikan dalam laporan keuangan, catatan atas laporan keuangan dan tambahan informasi lainnya, cukup penting untuk mempengaruhi penilaian dan keputusan pengguna informasi.

c. Kendala

Biaya-biaya dalam menyediakan informasi harus diperhitungkan terhadap manfaat yang dapat diperoleh dari menggunakannya dan materialitasnya. Dianggap material jika pencantuman atau pengabaian item tersebut mempengaruhi atau mengubah penilaian seorang pemakai laporan keuangan.

2.3. Standar Akuntansi Keuangan

2.3.1. Standar Akuntansi Keuangan di Dunia

Badan utama penyusun standar akuntansi yang berlaku di dunia yaitu *International Accounting Standards Board (IASB)* dan *Financial Accounting Standards Board (FASB)*. IASB mengeluarkan standar akuntansi pelaporan keuangan yang disebut *International Financial Reporting Standards (IFRS)*, sedangkan FASB mengeluarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku umum atau disebut *Generally Accepted Accounting Principles (GAAP)*.

Di era globalisasi ini pasar ekonomi membutuhkan pelaporan keuangan perusahaan yang dapat diperbandingkan di berbagai negara. Oleh karena itu, kedua badan utama penyusun standar akuntansi keuangan mengurangi perbedaan yang ada antara standar IFRS dan US GAAP. Proses tersebut dinamakan konvergensi, dibuat dengan tujuan, hanya ada satu (1) standar akuntansi yang digunakan oleh perusahaan diseluruh dunia.

2.3.2. Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia

2.3.2.1. Latar Belakang Standar Akuntansi Keuangan (SAK)

Adanya perubahan lingkungan global yang semakin menyatukan hampir seluruh negara di dunia dalam komunitas tunggal, yang dijumpai perkembangan teknologi komunikasi dan informasi yang semakin murah, menuntut adanya transparansi di segala bidang. Standar Akuntansi Keuangan yang berkualitas merupakan salah satu prasarana penting untuk mewujudkan transparansi tersebut. Standar akuntansi keuangan dapat diibaratkan sebagai sebuah cermin yang baik akan mampu menggambarkan kondisi praktis bisnis yang sebenarnya. Oleh karena itu, pengembangan standar akuntansi keuangan yang baik, sangat relevan dan mutlak diperlukan pada masa sekarang ini.

Terkait hal tersebut, Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) sebagai wadah profesi akuntansi di Indonesia selalu tanggap terhadap perkembangan yang terjadi, khususnya dalam hal-hal yang memengaruhi dunia usaha dan profesi akuntan. Hal ini dapat dilihat dari dinamika kegiatan pengembangan standar akuntansi sejak berdirinya IAI pada tahun 1957 hingga kini. Setidaknya, terdapat tiga tonggak sejarah dalam pengembangan standar akuntansi keuangan di Indonesia.

Tonggak sejarah pertama, menjelang diaktifkannya pasar modal di Indonesia pada tahun 1973. Pada masa itu merupakan pertama kalinya IAI melakukan kodifikasi prinsip dan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia dalam suatu buku “Prinsip Akuntansi Indonesia (PAI).”

Kemudian, tonggak sejarah kedua terjadi pada tahun 1984. Pada masa itu komite PAI melakukan revisi secara mendasar PAI 1973 dan kemudian mengkondifikasikannya dalam buku “Prinsip

Akuntansi Indonesia 1984” dengan tujuan untuk menyesuaikan ketentuan akuntansi dengan perkembangan dunia usaha.

Berikutnya pada tahun 1994, IAI kembali melakukan revisi total terhadap PAI 1984 dan melakukan kodifikasi dalam buku “Standar Akuntansi Keuangan (SAK) per 1 Oktober 1994.” Sejak tahun 1994, IAI juga telah memutuskan untuk melakukan harmonisasi dengan standar akuntansi internasional dalam pengembangan standarnya. Dalam perkembangan selanjutnya, terjadi perubahan dari harmonisasi ke adaptasi, kemudian menjadi adopsi dalam rangka konvergensi dengan *International Financial Reporting Standards* (IFRS). Program adopsi penuh dalam rangka mencapai konvergensi dengan IFRS direncanakan dapat terlaksana dalam beberapa tahun ke depan.

Dalam perkembangannya, standar akuntansi keuangan terus direvisi secara berkesinambungan, baik berupa penyempurnaan maupun penambahan standar baru sejak tahun 1994. Proses revisi telah dilakukan enam kali, yaitu pada tanggal 1 Oktober 1995, 1 Juni 1996, 1 Juni 1999, 1 April 2002, 1 Oktober 2004, dan 1 September 2007. Buku “Standar Akuntansi Keuangan per 1 September 2007” ini di dalamnya sudah bertambah dibandingkan revisi sebelumnya yaitu tambahan KDPPLK Syariah, 6 PSAK baru, dan 5 PSAK revisi. Secara garis besar, sekarang ini terdapat 2 KDPPLK, 62 PSAK dan 7 ISAK.

Untuk dapat menghasilkan standar akuntansi keuangan yang baik, maka badan penyusunnya terus dikembangkan dan disempurnakan sesuai dengan kebutuhan. Awalnya, cikal bakal badan penyusun standar akuntansi adalah Panitia Penghimpunan Bahan-bahan dan struktur dari GAAP (*Generally Accepted Accounting Principles*) dan GAAS (*Generally Accepted Accounting Standards*) yang dibentuk pada tahun 1973. Pada tahun 1974 dibentuk Komite Prinsip Akuntansi Indonesia (PAI) yang bertugas menyusun dan mengembangkan standar akuntansi

keuangan. Komite PAI telah bertugas selama empat periode kepengurusan IAI sejak tahun 1974 hingga 1994 dengan susunan personel yang terus diperbarui. Selanjutnya, pada periode kepengurusan IAI tahun 1994-1998 nama komite PAI diubah menjadi Komite Standar Akuntansi Keuangan (Komite SAK).

Kemudian pada Kongres VIII IAI tanggal 23-24 September 1998 di Jakarta, Komite SAK diubah kembali menjadi Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) dengan diberikan otonomi untuk menyusun dan mengesahkan PSAK dan ISAK. Selain itu, juga telah dibentuk Komite Akuntansi Syariah (KAS) dan Dewan Konsultatif Standar Akuntansi Keuangan (DKSAK). Komite Akuntansi Syariah (KAS) dibentuk tanggal 18 Oktober 2005 untuk menopang kelancaran kegiatan penyusunan PSAK yang terkait dengan perlakuan akuntansi transaksi syariah yang dilakukan oleh DSAK. Sedangkan DSAK yang anggotanya terdiri atas profesi akuntan dan luar profesi akuntan, yang mewakili para pengguna, merupakan mitra DSAK dalam merumuskan arah dan pengembangan SAK di Indonesia.

2.3.2.2. Sejarah Dalam Menetapkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK)

Standar akuntansi keuangan menciptakan metode yang seragam untuk menyajikan informasi, sehingga laporan keuangan dari berbagai perusahaan yang berbeda dapat dibandingkan dengan lebih mudah kumpulan konsep, standar, prosedur, metode, konvensi, kebiasaan dan praktik yang dipilih dan dianggap diterima umum disebut: *Generally Accepted Accounting Principles* (GAAP).

Badan yang membuat standar akuntansi keuangan di Amerika Serikat yaitu *Financial Accounting Standards Board* (FASB) berdiri tahun 1973 menggantikan *American Principles Board* (APB) sebuah lembaga swasta yang bertanggung jawab untuk

pembentukan standar akuntansi di Amerika Serikat. Produk FASB adalah Publikasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (*Statements of Financial Accounting Standards*).

Organisasi lain yang penting dalam pelaporan keuangan adalah SEC (*Securities and Exchange Commission*) dibentuk tahun 1934 dengan tugas utama mengatur penawaran dan perdagangan efek oleh perusahaan kepada masyarakat. AICPA (*American Institute of Certified Public Accounting*) merupakan organisasi profesional dari para akuntan publik yang tersertifikasi.

Pada tahun 2007 Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) Ikatan Akuntan Indonesia mengesahkan tiga *Exposure Draft* menjadi PSAK yaitu PSAK No. 13 (revisi 2007) Properti Investasi, PSAK No. 16 (revisi 2007) Aset Tetap dan PSAK No. 30 (revisi 2007) Sewa. Ketiga PSAK tersebut berlaku efektif untuk penyusunan laporan keuangan untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2008. Ketiga PSAK tersebut terutama membahas mengenai standar perlakuan akuntansi untuk aset tetap. Pengesahan ketiga PSAK tersebut dilakukan sebagai bagian dari proses konvergensi PSAK terhadap *International Financial Reporting Standards* (IFRS). Oleh karena itu materi PSAK baru tersebut diambil seluruhnya dari IFRS dengan beberapa penyesuaian karena ada beberapa nomor IFRS yang belum diadopsi di dalam PSAK.

Dengan berlaku secara efektif ketiga PSAK tersebut maka PSAK lama yaitu PSAK No. 13 (1994) Akuntansi untuk Investasi, PSAK No. 16 (1994) Aktiva Tetap dan Aktiva Lain-lain, PSAK No. 17 (1994) Akuntansi Penyusutan dan PSAK No. 30 (1990) Akuntansi Sewa Guna Usaha menjadi tidak berlaku untuk penyusunan laporan keuangan sebuah entitas. Kemudian pada tanggal 23 Mei 2008 Menteri Keuangan Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan No. 79/PMK.03/2008 (PMK 79/2008) tentang Penilaian Kembali Aset Tetap Perusahaan

untuk Tujuan Perpajakan. PMK 79/2008 ini menggantikan peraturan sejenis yaitu Keputusan Menteri Keuangan Nomor 486/KMK.03/2002.

2.3.2.3. Perkembangan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) di Indonesia

Pada periode 1973-1984, Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) telah membentuk Komite Prinsip-prinsip Akuntansi Indonesia untuk menetapkan standar-standar akuntansi, yang kemudian dikenal dengan Prinsip-prinsip Akuntansi Indonesia (PAI).

Pada periode 1984-1994, komite PAI melakukan revisi secara mendasar PAI 1973 dan kemudian menerbitkan Prinsip Akuntansi Indonesia 1984 (PAI 1984). Menjelang akhir 1994, Komite standar akuntansi memulai suatu revisi besar atas prinsip-prinsip akuntansi Indonesia dengan mengumumkan pernyataan-pernyataan standar akuntansi tambahan dan menerbitkan interpretasi atas standar tersebut. Revisi tersebut menghasilkan 35 pernyataan standar akuntansi keuangan, yang sebagian besar harmonis dengan IAS yang dikeluarkan oleh IASB.

Pada periode 1994-2004, ada perubahan kiblat dari US GAAP ke IFRS, hal ini ditunjukkan sejak tahun 1994, telah menjadi kebijakan dari Komite Standar Akuntansi Keuangan untuk menggunakan *International Accounting Standards* sebagai dasar untuk membangun standar akuntansi keuangan Indonesia. Dan pada tahun 1995, IAI melakukan revisi besar untuk menerapkan standar-standar akuntansi baru, yang kebanyakan konsisten dengan IAS. Beberapa standar diadopsi dari US GAAP dan lainnya dibuat sendiri.

Standar Akuntansi di Indonesia kini berkembang menjadi 4 (empat) mengikuti dengan perkembangan dunia usaha. Empat pilar standar itu adalah :

1. Standar Akuntansi Keuangan (SAK Umum)

SAK Umum adalah standar akuntansi keuangan yang nantinya akan dikonvergensi ke IFRS dan akan selesai ditahun 2012. SAK

Umum digunakan untuk entitas yang memiliki akuntabilitas publik, yaitu entitas terdaftar atau dalam proses pendaftaran di pasar modal atau entitas fidusia (entitas yang menggunakan dana masyarakat, seperti asuransi, perbankan, dan dana pensiun).

2. Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP)

SAK ETAP ini akan membantu menyediakan laporan keuangan yang relevan dan andal dengan standar akuntansi yang lebih sederhana dibandingkan dengan standar akuntansi keuangan berbasis IFRS yang diadopsi di dalam SAK Umum. SAK ETAP digunakan untuk entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan dalam menyusun laporan keuangan untuk tujuan umum seperti UMKM.

3. Standar Akuntansi Keuangan Syariah (SAK Syariah)

Standar ini digunakan untuk entitas yang memiliki transaksi syariah atau berbasis syariah . Standar ini terdiri atas kerangka konseptual penyusunan dan pengungkapan laporan, standar penyajian laporan keuangan dan standar khusus transaksi syariah seperti mudharabah, murabahah, salam, ijarah, istishna.

Bank syariah menggunakan dua standar dalam menyusun laporan keuangan. Sebagai entitas yang memiliki akuntabilitas publik signifikan, bank syariah menggunakan SAK Umum, sedangkan untuk transaksi syariahnya menggunakan SAK Syariah.

4. Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)

Standar ini digunakan untuk menyusun laporan keuangan instansi pemerintahan, baik pusat ataupun daerah. SAP berbasis akrual ditetapkan dalam PP No. 71 Tahun 2010. Instansi masih diperkenankan menggunakan PP No. 24 Tahun 2005, SAP berbasis kas menuju akrual sampai tahun 2014.

SAP berbasis kas menuju akrual menggunakan basis kas untuk penyusunan laporan realisasi anggaran dan menggunakan basis akrual untuk penyusunan neraca.

Pada SAP berbasis akrual, laporan realisasi anggaran tetap menggunakan basis kas karena akan dibandingkan dengan anggaran yang disusun dengan menggunakan basis kas, sedangkan laporan operasional yang melaporkan kinerja entitas disusun dengan menggunakan basis akrual.

2.4. Perbedaan dan Persamaan SAK Umum dan SAK ETAP

2.4.1. Perbedaan SAK Umum dan SAK ETAP

Dengan adanya ED (*exposure draft*) PSAK dimasa depan penyajian laporan keuangan mengikuti IFRS, terdapat perbedaan antara SAK Umum dengan SAK ETAP antara lain :

1. Penyajian Laporan Keuangan; pada SAK Umum, tidak ada lagi pos luar biasa pada Neraca, Laba Rugi Komprehensif dan Laporan Arus Kas menggunakan metode langsung (dianjurkan), dan tidak langsung. Sedangkan pada SAK ETAP pos yang ada di neraca lebih sedikit, tidak menyajikan atau mengungkapkan pos pendapatan dan beban sebagai “pos luar biasa”, Laporan Laba Rugi (tanpa harus menyajikan laba rugi komprehensif) dan Laporan Arus Kas dengan metode tidak langsung.
2. Aset tetap dan Properti; pada SAK umum memberikan pilihan metode biaya atau revaluasi untuk aset tetap dan metode *fair value* untuk properti investasi. SAK ETAP menggunakan metode biaya untuk aset tetap dan properti investasi kecuali ada ketentuan pemerintah yang mengharuskan model revaluasi diterapkan.
3. Aset Tidak Berwujud; SAK Umum saat ini menerapkan bahwa aset tidak berwujud diamortisasi selama 20 tahun, aset tidak berwujud dengan masa manfaat tidak terbatas, tidak diamortisasi, ED (*exposure draft*) PSAK 19 (Terbit 2011). Sedangkan SAK ETAP menerapkan bahwa aset tidak berwujud diamortisasi selama 10 tahun dan pengukurannya menggunakan metode biaya.
4. Instrumen Keuangan; pada SAK Umum ruang lingkup instrumen keuangan pada aset dan kewajiban keuangan. Diklasifikasikan pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, dimiliki hingga jatuh tempo, tersedia

untuk dijual, pinjaman dan pinjaman yang diberikan. *Impairment* menggunakan *Incurred Loss Concept, Derecognition, Hedging* dan *Derivatif*. Sedangkan SAK ETAP, ruang lingkup pada investasi pada efek tertentu, Klasifikasi *Trading, Held to Maturity*, dan *Available for Sale*. Hal tersebut mengacu pada PSAK No. 50 (1998), jauh lebih sederhana dibanding ketentuan PSAK 50 dan PSAK 55 (revisi 2006)

5. Penurunan Nilai Aset; SAK Umum memuat ruang lingkup kecuali; persediaan, aset yang timbul dari kontrak konstruksi, aset pajak tangguhan, aset yang timbul dari manfaat pensiun, penurunan nilai non persediaan, penurunan nilai unit penghasil kas dan *goodwill*. Sedangkan SAK ETAP memuat ruang lingkup yang meliputi semua jenis aset kecuali aset yang timbul dari manfaat pensiun, tidak mengatur penurunan nilai *goodwill*, ada tambahan penurunan nilai untuk pinjaman yang diberikan dan piutang yang menggunakan PSAK 31.
6. Laporan Keuangan Konsolidasian; pada SAK Umum Laporan Keuangan konsolidasi diatur dalam PSAK 4 dengan menggunakan metode ekuitas (entitas asosiasi) dan metode konsolidasi penuh untuk entitas anak. Sedangkan pada SAK ETAP tidak diatur, bila memiliki investasi atas asosiasi maupun *subsidiary* menggunakan metode ekuitas (*online consolidation*).
7. Sewa; SAK Umum mengatur perjanjian yang mengandung sewa, klasifikasi bersifat *principle based* dan laporan keuangan *lessee dan lessor*. Sedangkan SAK ETAP tidak mengatur perjanjian yang mengandung sewa (PSAK 8), klasifikasi sewa; kombinasi IFRS for SMEs dan SFAS 13 *rule based*, laporan keuangan lesse dan lessor menggunakan PSAK 30 (1994) Akuntansi Sewa.
8. Biaya Pinjaman, pada SAK Umum dicatat dalam komponen biaya pinjaman, pengakuan dan kapitalisasi biaya pinjaman. Sedangkan SAK ETAP biaya pinjaman langsung dibebankan.
9. Imbalan Kerja, SAK Umum menjelaskan antara lain imbalan kerja jangka pendek, imbalan pasca kerja, untuk manfaat pasti menggunakan PUC (*Project Unit Credit*), imbalan jangka panjang lainnya, pesangon

pemutusan kerja, imbalan berbasis ekuitas. Sedangkan SAK ETAP menjelaskan bahwa tidak termasuk imbalan berbasis ekuitas dan untuk manfaat pasti menggunakan PUC dan jika tidak bias, menggunakan metode yang disederhanakan.

10. Pajak Penghasilan, SAK Umum menggunakan *deferred tax concept*, Pengakuan dan pengukuran pajak kini dan pengakuan dan pengukuran pajak tangguhan. Sedangkan SAK ETAP menggunakan *tax payable concept* dan tidak ada pengakuan dan pengukuran pajak tangguhan.

2.4.2. Persamaan SAK Umum dan SAK ETAP

Selain perbedaan-perbedaan tersebut juga terdapat beberapa persamaan antara SAK Umum dengan SAK ETAP, antara lain :

1. Persediaan, keduanya sama-sama tidak lagi mengizinkan metode *LIFO* (PSAK 14) (IAI: revisi 2008) dan juga ketentuan lain seperti pengukuran, persediaan, biaya persediaan, biaya pembelian, biaya konversi, biaya lain-lain, biaya persediaan pemberian jasa, teknik pengukuran biaya, rumus biaya, nilai realisasi bersih, pengakuan sebagai beban dan pengungkapan.
2. Pendapatan; sama-sama memuat ketentuan tentang penjualan barang, penjualan jasa, kontrak konstruksi, bunga, dividen dan royalti, lampiran kasus pengakuan pendapatan (ED PSAK 23).
3. Peristiwa Setelah Tanggal Neraca; memuat ketentuan tentang Peristiwa yang memerlukan penyesuaian dan peristiwa yang tidak memerlukan penyesuaian.
4. Pengungkapan Pihak-pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa; memuat ketentuan tentang pengertian pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dan pengungkapan.

2.5. SAK ETAP

2.5.1. Latar Belakang dan Tujuan SAK ETAP

Latar belakang diperlukannya SAK ETAP karena Standar Akuntansi Keuangan yang mengadopsi IFRS terlalu kompleks untuk diterapkan oleh perusahaan kecil menengah di Indonesia.

Oleh karena itu, pada tanggal 19 Mei 2009, DSAK mengesahkan Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP). Standar ini diberi nama SAK ETAP mengingat definisi UKM yang sering berubah dan untuk menghindari kerancuan. SAK ETAP ini merupakan adopsi dari *International Financial Reporting Standards for Small and Medium-sized Entities (IFRS for SMEs)*. Walaupun memiliki judul yang berbeda kedua standar ini sama-sama diperuntukkan bagi entitas tanpa akuntabilitas publik.

Tujuan penyusunan SAK ETAP tidak hanya sebagai standar akuntansi keuangan yang layak bagi perusahaan kecil dan menengah atau perusahaan belum *go public*, tetapi juga membantu melatih perusahaan sejak dini agar lebih matang dalam mempersiapkan laporan keuangan kedepannya ketika *go public*.

2.5.2. Ruang Lingkup SAK ETAP

Ruang Lingkup menurut SAK ETAP (2009:ETAP.1) :

Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) dimaksudkan untuk digunakan entitas tanpa akuntabilitas publik.

Entitas tanpa akuntabilitas publik adalah entitas yang :

- a. Tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan, dan
- b. Menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statement*) bagi pengguna eksternal. Contoh : pengguna eksternal adalah publik yang tidak terlibat langsung dalam pengelolaan usaha, kreditur dan lembaga pemeringkat kredit.

Entitas memiliki akuntabilitas publik jika :

- a. Entitas telah mengajukan pernyataan pendaftaran atau dalam proses pengajuan pernyataan pendaftaran, pada otoritas pasar modal atau regulator lain untuk tujuan penerbitan efek di pasar modal, atau
- b. Entitas menguasai aset dalam kapasitas sebagai fidusia untuk sekelompok besar masyarakat, seperti bank, entitas asuransi, pialang dan atau pedagang efek, dana pensiun, reksa dana dan bank investasi.

Entitas yang memiliki akuntabilitas publik signifikan dapat menggunakan SAK ETAP jika otoritas berwenang membuat regulasi mengizinkan penggunaan SAK ETAP.

2.5.3. Ketentuan Transisi

Ketentuan transisi menurut SAK ETAP (2013:ETAP.29) :

Entitas menerapkan SAK ETAP secara retrospektif, namun jika tidak praktis, maka entitas diperkenankan untuk menerapkan SAK ETAP secara prospektif. Entitas yang menerapkan secara prospektif dan sebelumnya telah menyusun laporan keuangan maka:

- a. Mengakui semua aset dan kewajiban yang pengakuannya dipersyaratkan dalam SAK ETAP;
- b. Tidak mengakui pos-pos sebagai aset atau kewajiban jika SAK ETAP tidak mengizinkan pengakuan tersebut;
- c. Mereklasifikasikan pos-pos yang diakui sebagai suatu jenis aset, kewajiban atau komponen ekuitas berdasarkan kerangka pelaporan sebelumnya, tetapi merupakan jenis aset, kewajiban, atau komponen ekuitas yang berbeda berdasarkan SAK ETAP;
- d. Menerapkan SAK ETAP dalam pengukuran seluruh aset dan kewajiban yang diakui.

Kewajiban akuntansi yang digunakan oleh entitas pada saldo awal neraca nya berdasarkan SAK ETAP mungkin berbeda dari yang digunakan untuk tanggal yang sama dengan menggunakan kerangka pelaporan keuangan sebelumnya. Hasil penyesuaian yang muncul dari transaksi, kejadian atau

kondisi lainnya sebelum tanggal efektif SAK ETAP diakui secara langsung pada saldo laba pada tanggal penerapan SAK ETAP.

Pada tahun awal penerapan SAK ETAP, entitas yang memenuhi persyaratan untuk menerapkan SAK ETAP dapat menyusun laporan keuangan tidak berdasarkan SAK ETAP, tetapi berdasarkan PSAK non-ETAP sepanjang diterapkan secara konsisten. Entitas tersebut tidak diperkenankan untuk kemudian menerapkan SAK ETAP ini untuk penyusunan laporan keuangan berikutnya.

Entitas yang menyusun laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP kemudian tidak memenuhi persyaratan entitas yang boleh menggunakan SAK ETAP, maka entitas tersebut tidak diperkenankan untuk menyusun laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP. Entitas tersebut wajib menyusun laporan keuangan berdasarkan PSAK non-ETAP dan tidak diperkenankan untuk menerapkan SAK ETAP.

Entitas yang sebelumnya menggunakan PSAK non-ETAP dalam menyusun laporan keuangannya dan kemudian memenuhi persyaratan entitas yang dapat menggunakan SAK ETAP, maka entitas tersebut dapat menggunakan SAK ETAP ini dalam menyusun laporan keuangan.

2.5.4. Tanggal Efektif

SAK ETAP diterapkan untuk penyusunan laporan keuangan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2011. Penerapan ini diperkenankan. Jika SAK ETAP diterapkan dini, maka entitas harus menerapkan SAK ETAP untuk penyusunan laporan keuangan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2010.

2.5.5. Pengakuan dan Pengukuran

Menurut SAK ETAP (2013:11) Persyaratan untuk pengakuan dan pengukuran aset, kewajiban, penghasilan dan beban didasarkan pada prinsip *pervasive* (berpengaruh luas). Entitas harus menyusun laporan keuangan, kecuali laporan arus kas, dengan menggunakan dasar akrual. Dalam dasar akrual, pos-pos diakui sebagai aset, kewajiban, ekuitas, penghasilan dan beban

(unsur-unsur laporan keuangan ketika memenuhi definisi dan kriteria pengakuan untuk pos-pos tersebut).

2.5.5.1. Pengakuan

a. Aset

Aset diakui dalam neraca jika kemungkinan manfaat ekonominya di masa depan akan mengalir ke entitas dan aset tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Aset tidak diakui dalam neraca jika pengeluaran telah terjadi dan manfaat ekonominya dipandang tidak mungkin mengalir ke dalam entitas setelah periode pelaporan berjalan. Sebagai alternatif transaksi tersebut menimbulkan pengakuan beban dalam laporan laba rugi.

b. Kewajiban

Kewajiban diakui dalam neraca jika kemungkinan pengeluaran sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban masa kini dan jumlah yang harus diselesaikan dapat diukur dengan andal.

c. Penghasilan

Pengakuan penghasilan merupakan akibat langsung dari pengakuan aset dan kewajiban. Penghasilan diakui dalam laporan laba rugi jika kenaikan manfaat ekonomi dimasa depan yang berkaitan dengan peningkatan aset atau penurunan kewajiban telah terjadi dan dapat diukur secara andal.

d. Beban

Pengakuan beban merupakan akibat langsung dari pengakuan aset dan kewajiban. Beban diakui dalam laporan laba rugi jika penurunan manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan penurunan aset atau peningkatan kewajiban telah terjadi dan dapat diukur secara andal.

e. Laba atau Rugi

Laba atau rugi merupakan selisih aritmatika antara penghasilan dan beban. Hal tersebut bukan merupakan suatu unsur terpisah dari laporan keuangan, dan prinsip pengakuan yang terpisah tidak diperlukan.

SAK ETAP tidak mengizinkan pengakuan pos-pos dalam neraca yang tidak memenuhi definisi aset atau kewajiban dengan mengabaikan apakah pos-pos tersebut merupakan hasil dari penerapan *matching concept*.

f. Saling Hapus

Saling hapus tidak diperkenankan atas aset dengan kewajiban, atau penghasilan dengan laba, kecuali disyaratkan atau diizinkan oleh SAK ETAP.

Pengukuran nilai aset secara neto dari penilaian penyisihan bukan merupakan saling hapus, misalnya penyisihan atas keuangan persediaan dan penyisihan atas piutang tak tertagih.

Jika aktivitas entitas yang biasa tidak termasuk membeli dan menjual aset tidak lancar (termasuk investasi dan aset operasional), maka entitas melaporkan keuntungan dan kerugian atas pelepasan aset dengan mengurangi hasil penjualan dengan jumlah tercatat aset dan beban penjualan yang terkait.

2.5.5.2. Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan jumlah uang yang digunakan entitas untuk mengukur aset, kewajiban, penghasilan dan beban dalam laporan keuangan. Proses ini termasuk pemilihan dasar pengukuran tertentu.

Dasar pengukuran yang umum adalah biaya historis dan nilai wajar:

- a. Biaya historis adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar dari pembayaran yang diberikan untuk memperoleh aset pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar kas atau setara kas yang diterima atau sebesar nilai wajar dari aset non-kas yang

diterima sebagai penukar dari kewajiban pada saat terjadinya kewajiban.

- b. Nilai wajar adalah jumlah yang dipakai untuk mempertukarkan suatu aset, atau untuk menyelesaikan suatu kewajiban, antara pihak-pihak yang berkeinginan dan memiliki pengetahuan memadai dalam suatu transaksi dengan wajar.